

PERAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASIDI KOTA SAMARINDA

Marudut Tua Sinaga¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang peran Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembagunan prasarana transportasi kota Samarinda.dalamPerumusan perencanaan pembangunan prasarana transportasi kota Samarinda berdasarkan pada 2 indikator yakni Top Down dan Bottom Up, perencanaan dilakukan pada awal tahun sesuai amanat Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang sistem precanaan nasional, perencannaan yang dilakukan BAPPEDA bersifat makro dan satuan perangkat daerah (SKPD) lebih berperan dalam penyusunan perencanaan bappeda lebih berperan sebagai filter dari setiap rencana yang di buat oleh setiap SKPD, koordinasi dilakukan Bappeda secara rutin per tiga(3) bulan bersama SKPD terkait dalam perencanaan pembangunan prasarana transportasi kota Samarinda mulai dari tahapan perumusan penyusunan hingga pada tahap Evaluasi, faktor yang menjadi penghambat dalam perencanaan pembangunan prasarana transportasi kota Samarinda lebih terletak pada faktor sosial yang berhubungan pada hak-hak masyarakat.

Kata Kunci :*Peran BAPPEDA, Perencanaan Pembangunan,Samarinda*

Pendahuluan

Seiring dengan terus berkembangnya dan meningkatnya jumlah kendaraan di kota Samarinda serta di ikuti dengan meningkatnya arus mobilitas masyarakat di kota Samarinda namun hal ini tidak di imbangi dengan kapasitas jalan di kota Samarinda, maka kota Samarinda melalui Pemerintah kota Samarinda yang memiliki peran sebagai fasilitator dan serta sebagai pelayan masyarakat di desak untuk menyediakan prasarana transportasi yang sesuai dengan kebutuhan kota Samarinda namun berbagai pihak menilai Pemerintah kota Samarinda lamban dalam perencanaan pembangunan prasarana transportasi guna mengatasi terus meningkatnya jumlah kendaran di kota Samarinda yang akan mengarah pada kepadatan kendaran yang pada akhirnya terjadi kemacetan.

Kondisi masalah prasarana transportasi dapat dikatakan sudah tidak sesuai dengan terus meningkatnya jumlah kendaraan di kota Samarinda dan ditambah lagi dengan jumlah kendaran dari luar kota Samarinda yang

¹ Mahasiswa program S1 Ilmu pemerintahan , ilmu sosial dan ilmu politik, universitas Mulawarman. Email: Sinagabatak56@yahoo.com

barang tentu akan menambah jumlah kendaraan di kota Samarinda. Berbagai perencanaan untuk mengatasi kepadatan kendaraan di jembatan Mahakam telah dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda, Namun tetap saja sejumlah sarana itu, dipandang masih belum maksimal, baik dari kondisi serta letaknya.

Dengan terus berkembangnya kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang kaya akan sumber daya alam maka pemerintah kota Samarinda Sebagai penyelenggara utama pembangunan daerah, melalui Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) haruslah melakukan perencanaan yang matang akan pembangunan prasarana transportasi darat yang

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : sinagabatak 56@yahoo.com

efeknya dirasakan langsung oleh masyarakat di kota Samarinda sehingga pembangunan transportasi di kota Samarinda sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Samarinda dan pembangunan di kota Samarinda memiliki konsep yang berkelanjutan guna mendukung berjalannya arus mobilitas manusia dan barang sebagai upaya pembangunan kota Samarinda khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya.

Kerangka Dasar Teori

Peran Bappeda

Menurut Suhardono (1999: 10) mengatakan bahwa sebenarnya istilah “peran” sudah dengan sendirinya diperlakukan secara perfektif (sebagai patokan) artinya menunjukkan keharusan (*oughtness, shouldness*) untuk dibawakan..Sedang menurut John Wahkle dalam Suhardono (1999: 12) peran di bedakan berdasarkan pada actor yang memainkan peranan tersebut, yaitu:

- a) peran yang di mainkan oleh aktor individual
- b) peran yang dimainkan oleh badan atau institusi

Sedang menurut Gibson Invancevich Dan Donelly (2001 : 429) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Dan beberapa bagian lingkungan.

BAPPEDA merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya dibidang perencanaan pembangunan daerah.

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya yang termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan prasarana Transportasi.

Perencanaan

Perencanaan atau yang akrab dengan istilah *planning* adalah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanan ini salalu melekat pada kegiatan hidup manusia sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Secara sederhana perencanaan dapat dirumuskan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui urutan pilihan dapat memperhitungkan sumber daya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan –tujuan tersebut.

Di dalam bahasa Inggris perencanaan (*planning*), menurut George R Terry perencanaan dirumuskan sebagai tindakan yang harus dilakukan dalam menjawab 6 buah pertanyaan yang lazim dikenal sebagai 5W+1H, yaitu:

1. Tindakan apa yang harus dikerjakan (*WHAT*)
2. Apakah sebabnya tindakan itu dikerjakan (*WHY*)
3. Dimanakah tindakan itu akan dilakukan (*WHERE*)
4. Bilamana/ kapan tindakan itu dikerjakan (*WHEN*)
5. Siapa yang akan mengerjakan tindakan itu (*WHO*)
6. Bagaimana pelaksanaannya (*HOW*)

Definisi yang terpisah-pisah mengenai perencanaan memang sangat banyak, disini penulisakan mengemukakan beberapa rumusan mengenai pengertian perancanaan, yaitu;

1. Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
2. Perancanaan adalah suatu cara menyelaraskan tujuan yang telah ditentukan bersama.
3. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai bagaimana, bilamana, dimana dan oleh siapa.

Menurut O'Donnel dalam Hasibuan (2005:92) mengemukakan bahwa perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan alternative yang ada. menurut Siagian (2001:166) perencanaan merupakan tindakan manajerial untuk memutuskan sekarang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa dapan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan merupakan keterpaduan dalam kebijakan dan program.

Pembangunan

konsep pembangunan, maka dijelaskan arti pembangunan tersebut secara harfiah, yaitu menurut kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata ”bangun” yang artinya bangkit, berdiri, yang kemudian mendapat

imbuan “pem-an”, sehingga menjadi kata “pembangunan”, jadi pembangunan adalah suatu proses, cara, perbuatan membangun.

Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*), Siagian (2004:4), Kemudian Effendi (2002:9) memberikan pengertian pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Berdasarkan hal tersebut di atas jelas pembangunan adalah proses perubahan kearah yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasilnya, hal ini sejaklan dengan yang di kemukakan oleh Habibie (1994:14), Dari uraian diatas jelas bahwa pada dasarnya pembangunan mengandung unsur-unsur antara lain:

1. Pembangunan merupakan proses berkesinambungan
2. Merupakan suatu usaha yang dilaksanakan secara sadar dan terencana
3. Berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan yang mengarah pada modernisasi
4. Bertujuan ada pembinaan bangsa yang berlangsung secara terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dari pendapat- pendapat diatas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan itu tiada lain merupakan suatu rangkaian proses perbaikan yang mengarah pada perubahan yang ada dengan menafaatka sumber daya yang ada, dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat menuju keadaan yang dipandang lebih bernilai atau bermanfaat.

Transportasi

Transportasi sendiri berasal dari bahasa latin yakni *transportare*, *trans* yang berarti sebrang, dan *porate* yang berarti mengangkut, atau membawa, jadi dapat disimpulkan bahwa transportasi adalah kegiatan perpindahan barang dari satu ke tempat lain. Transportasi merupakan dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat. Djmari dalam Wahyudin (1998:15) mengatakan “ transportasi adalah pergerakan manusia dan barang dari satu tempat ketempat lain”.

UU RI Nomor 14 Tahun 1992 mendefinisikan transportasi sebagai memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kemudian Miro (2004:4) memberikan pengertian mengenai transportasi adalah sebagai suatu usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Selain itu pengertian transportasi Warpani (1990:10) adalah transportasi di samping sebagai sarana dan

prasarana kegiatan yang berfungsi sebagai alat untuk mempermudah dalam pencapaian lokasi yang di tuju.Fungsi utama transportasi erat hubungannya dengan aksesibilitas, maksudnya frekuensi penggunaannya, kecepatan yang dimilikinya membuat jarak yang jauh seolah-olah menjadi dekat. Disisi lain transportasi atau perangkutan diartikan sebagai perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, baik yang digerakan oleh tenaga manusia, hewan, atau mesin. Dengan demikian maka transportasi memiliki dimensi seperti lokasi (asal dan tujuan), alat (teknologi) dan keperluan tertentu Miro, (1997 : 8).

Menrut Handayani, (2006) Sistem transportasi merupakan suatu satuan dari unsur – unsur yang saling mendukung dalam pengadaan transportasi. Unsur-unsur transportasi tersebut adalah

- a) Manusia, yang membutuhkan transportasi
- b) Barang, yang diperlukan manusia
- c) Kendaraan, sebagai sarana transportasi
- d) Jalan,sebagai prasarana transportasi
- e) Organisasi, sebagai pengelola transportasi

Pada dasarnya, kelima unsur-unsur diatas saliang berkaitan satu dengan yang lain guna terlaksananya transportasi, yakni terjaminnya penumpang atau barang merasa nyaman dan sampai di tujuan dengan keadaan baik seperti pada awal diangkat Miro (1997 :10).

Prasarana transportasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang di maksud dengan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan sarana penunjang utama terlaksananya suatu proses (usaha, proyek, pembangunan,dsb).

Sedang dalam system transportasi, Pada dasarnya prasarana transportasi di definisikan sebagai bangunan-bangunan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan atau jasanya bagi kebutuhan dasar penduduk yang terdiri dari : jalan, terminal, Jembatan, Pelabuhan, dan bandara.

Definisi Konsepsional

Peran BAPPEDA adalah sangat strategis sebagai instansi atau badan yang berfungsi membantu walikota dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya perencanaan pembangunan daerah.Yang di dalamnya termasuk perencanaan pembangunan prasarana transportasi yang merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah.

Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan prasarana transportasi kota samarinda.maka jenis penelitian diklasifikasikan pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah yang

memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti.

Miles dan Huberman (2007:20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan.

Fokus Penelitian

1. Perumusan Perencanaan Pembangunan Prasarana Transportasi Dikota Samarinda.
2. Penyusunan Perencanaan Pembagunan Prasarana Transportasi Di Kota Samarinda.
3. Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana transportasi.
4. Koordinasi antara Bappeda dan dinas - dinas terkait dalam perencanaan pembangunan pasarana transportasi di kota samarinda
5. Faktor penghambat dalam perencanaan pembagunan prasarana transportasi di kota Samarinda.

Lokasi Penelitian

Yang akan menjadi tempat/lokasi penelitian yaitu: Badan perencanaan pembangunan daerah(DAPPEDA) kota Samarinda.

Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitin ini ialah sumber dataprimer dan sumber data skunder :

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan key informan di pandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan oleh peneliti secara langsung.

- a. *Key Informan* (informasi kunci) adalah informasi yang berkompeten dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini yang menjadi *key infoman* adalah Kepala BAPPEDA kota Samarinda
- b. *Informan* (informasi) adalah orang yang berkompeten dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini ialah kepala Bidang perencanaan fisik wilyah

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.Seperti

data-data yang mendukung dari buku-buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Untuk menunjang penelitian ini diambil data-data berupa dokumen-dokumen yang berasal dari kantor BAPPEDA Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi lapangan, penulisan menggunakan beberapa cara, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).
2. Penelitian Lapangan (field work research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Observasi.
 - b. Wawancara.
 - c. Penelitian Dokumen .

Dari data yang diperoleh di atas baik melalui observasi dan wawancara maupun dokumentasi, data tertulis serta data dari informan yang diolah dan dipadukan sehingga menghasilkan data yang memiliki validitas tinggi.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1992 : 19) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses siklus dan interaktif yang bergerak diantara empat “sumbu” yaitu mengumpullkan data, reduksi, penyajian data dan kesimpulan, yaitu :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi / penyederhanaan data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan

Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dianalisa dengan melakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam.

Perumusan Perencanaan Pembangunan Prasarana Transportasi Kota Samarinda

Perumusan perencanaan pembangunan prasarana transportasi kota Samarinda berdasarkan 2 indikator yakni *top down dan Bottom Up*. *top down* berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya dijabarkan oleh BAPPEDA, kemudian hasil dari pejabaran tersebut ditindak lanjuti oleh SKPD yang terkait dengan perencanaan pembangunan prasarana transportasi kota Samarinda yakni Dishub (Dinas perhubungan), yang selanjutnya dilakukan

kajian teknis dilapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan yang selanjutnya hasil kajian tersebut di disusun dalam bentuk Renja SKPD yang selanjutnya di himpun oleh Bappeda sebagai input Renja pemerintah daerah dan di seminarkan melalui musrenbang tingkat kota guna mendapatkan masukan dari masyarakat dan praktisi LSM guna mendapatkan rencana kegiatan pemerintah daerah.

Sedang perumusan perencanaan transportasi kota Samarinda yang bersifat *bottom up* terletak pada tahapan musarenbang kota dimana hasil dari musrenbang kelurahan dan kecamatan disampaikan dalam musarenbang kota untuk di jadikan input dalam rancangan RKPD sekaligus menjadi masukan bagi rancangan awal perencanaan pembangunan prasarana transportasi yang sudah ada.

Dalam tahapan perumusan perencanaan SKPD yakni Dishub merupakan instansi yang paling berperan dalam melakukan perumusan perencanaan dengan melakukan pengumpulan data dan informasi langsung ke lapangan, dan melakukan pengalisan Data dan informasi guna mendapatkan rancangan awal perencanaan, dimana hasil dari rancangan tersebut di sampaikan kepada Bappeda untuk dibawa pada Musawarah tingkat Kota untuk mendapatkan Masukan hingga mendapatkan hasil berupa kesepakatan bersama berupa rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Transportasi Kota Samarinda.

perencanaan pembangunan prasarana transportasi kota Samarinda dilakukan setiap awal tahun anggaran sesuai dengan amanat undang-undang No 25 thn 2004 sistem perencanaan Nasional yang melalui tahapan musyawarah tingkat kelurahan, kecamatan, Kota Provinsi, hingga tingkat pusat secara terstruktur dan berdasarkan pada alokasi APBD tahun sebelumnya. Dalam tahapan penyusunan perencanaan Bappeda berperan sebagai penghimpun serta fasilitator bagi perencanaan yang telah di buat oleh SKPD untuk pengangarannya hingga di tetapkan menjadi APBD. Perencanaan yang dilakukan Bappeda bersifat makro yang di muat dalam RPJMD yang kemudian di jabarkan untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh SKPD teknis yang dalam hal ini SKPD yang terlibat dalam perencanaan pembangunan prasarana transportasi kota Samarinda yaitu Dinas Perhubungan, Cipta Karya dan Bina Marga melakukan uji kelayakan/ DED (*Detail engineering desain*) dan selanjutnya dibentuk dalam renstra SKPD kemudian disampaikan kepada Bappeda dalam forum SKPD yang kemudian dimuat dalam Renja pemerintah daerah dan dibawa ke DPRD dalam proses *Hearing* guna mendapatkan hasil berupa RAPBD untuk tahun berikutnya.

Evaluasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Transportasi Kota Samarinda

Evaluasi yang dilakukan Bappeda lebih di tekankan pada evaluasi tahapan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, Evaluasi dilakukan berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan dengan melakukan monitoring langsung yang dilaksanakan setiap bulan, per-3 bulan dan akhir tahun secara totalitas dengan melibatkan SKPD teknis dan Badan keuangan. Penilaian yang dilakukan berdasarkan *schedule* yang direncanakan dengan capaian pelaksanaan melalui administrasi dan *monotiring* langsung di lapangan serta berdasarkan *unit price* dengan melihat pengeluaran keuangan dengan hasil di lapangan.

Selanjutnya evaluasi yang dilakukan pasca pelaksanaan berdasarkan pada aspek dari manfaat pembangunan dengan melakukan penilaian yang melibatkan pihak – pihak independen seperti LSM dan pihak perguruan tinggi atau pihak-pihak independen lainnya.

Kordinasi Bappeda Terhadap Instansi Terkait Dalam Perencanaan Pembangunan Prasarana Transportasi Kota Samarinda

Koordinasi yang dilakukan berupa rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin dengan mulai dari tahapan pembuatan rancangan rencana, penetapan perencanaan, pembuatan rencana, pelaksanaan sampai pada evaluasi yang melibatkan SKPD-SKPD terkait seperti Dinas Perhubungan, Cipta Karya Tata Kota Dan Bina Marga serta melibatkan Bagian Perkotaan jika menyangkut dengan pembebasan lahan dan keuangan. Rapat koordinasi yang maksud ialah Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) merupakan forum koordinasi antar-pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait, dimana Bappeda merupakan penyeimbang dengan berpikiran membangun kota membangun kota dengan *multi player efek* lain seperti yang di ungkapkan oleh kepala BAPPEDA kota Samarinda.

Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Perencanaan Pembangunan Prasarana Transportasi Kota Samarinda

Dari hasil wawancara di atas Secara keseluruhan Faktor yang menjadi penghambat dalam perencanaan pembangunan prasarana transportasi kota Samarinda lebih terletak pada yang menjadi penghambat dimana faktor social yang menjadi masalah utama seperti pembebasan lahan dimana masyarakat kerap mematok harga tanah yang di luar dari harga yang di

tetapkan oleh pemerintah hal ini menyebabkan ketidak sesuaian dana yang telah di tetapkan dalam APBD dengan dana kebutuhan dilapangan yang meyebabkan banyak rencana kegiatan yang *delay* yang akhirnya batal untuk dilaksanakan.

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam perencanaan pembangunan prasarana transportasi kota Samarinda ialah faktor sumber daya manusia seperti di jelaskan oleh kepala sub Bidang prasana fisik wilayah dalam melakukan perencanaan pembagunan Bappeda memerlukan pihak ketiga sebagai konsultan dalam perencanaan pembangunan. alam dan keterlambatan bahan baku turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana Transportasi kota Samarinda.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada fokus penelitian yang penulis temukan, maka dapat disimpulkan bahwa peran BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan prasarana transportasi kota Samarinda sebagai berikut :

Dalam tahapan perumusan perencanaan SKPD yakni Dishub lebih berperan dengan melakukan pengumpulan data dan informasi dan mekakukan anlisis dari data dan informasi yang di peroleh guna mendapatkan rancangan awal perencanaan, Bappeda ialah sebagai fasilitator SKPD dalam melaksanakan Musarenbang kota guna mendapatkan masukan dari masyarakat dan LSM dan menghimpun hasil kesepakatan musrenbang untuk di jadikan rencana kerja daerah.

Dalam perencanaan pembangunan prasarana transportasi kota Samarinda dilakukan setiap awal tahun anggaran sesuai dengan amanat undang-undang No 25 thn 2004 sistem perencannan nasional yang melalui tahapan musyawarah tingkat kelurahan, kecamatan, Kota Provinsi, hingga tingkat pusat secara terstruktur dan berdasarkan pada alokasi APBD tahun sebelumnya. perencanaan yang dilakukan Bappeda bersifat makro yang di muat dalam RPJMD dan selanjutnya ditindak lajuti oleh SKPD teknis yang dalam hal ini ialah Dishub, Bina marga dan Cipta karya. Dalam tahapan penyusunan perencanaan pembagunan Bappeda berperan fasilitator dalam merencanakan penganggaran perencanaan pembagunana hingga di tetapkan menjadi APBD.

Pada tahap evaluasi Bappeda lebih di tekankan pada evaluasi tahapan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, Evaluasi dilakukan berdasarkan pada pelaksanan kegiatan dengan melakukan monitoring langsung yang dilaksanakan setiap bulan, per-3 bulan dan akhir tahun secara totalitas dengan melibatkan SKPD tenknis dan badan keuangan.

Sebagai koordinator bagi setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang terkait dalam perencanaan pembangunan prasarana transportasi yakni Dinas Perhubungan, Bina marga, Ciptakarya. Dimana BAPPEDA menjadi Bappeda merupakan penyeimbang dengan berpikiran membangun kota membangun kota dengan multi player efek lain, serta Menjadi fasilitator dalam mendukung penganggaran perencanaan ke DPRD.

Faktor yang menjadi penghambat dalam perencanaan pembagunan prasarana transportasi kota Samarinda ialah pada bagian pelaksanaan kegiatan dimana faktor sosial yang menyangkut hak-hak masyarakat seperti pembebasan lahan menjadi masalah yang kerap di temui dalam pelaksanaan perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Sarjono. 2002 .*Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suhardono,Edy.1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan,S.P. Malayu.2005, *manajemen dasar pengertian masalah*.jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, sondang,p 1989. *Perencanaan dan pembiayaan pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Siagian, sondang,p. 2003. *Administrasi pembangunan, konsep dimensi dan strateginya*. Jakarta: PT. Bumi aksara.
- Riyadi dan Deddy supriadi bratakusumah. 2004. *Perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, Arief. 2000.*Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Bachtiar.2002.*Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*.Yogykarta : Uhaindo Dan Offset.
- Habibie, B.J.1994. *Ilmu pengetahuan teknologi dan pembangunan bangsa*. Jakarta:cides.
- Fidel,miro.1997. *Perencanaan transportasi kota. Bandung* .Tarsito.
- Fidel,miro.2004.*perencanaan transportasi untuk mahasiswa perencanaan dan praktisi* :Bandung.Erlangga.
- Miles,b matthew dan a.michael huberman. 1992. *Analisis data kualitatif*. UIP.
- Moleong,lexy j, 2006. *Metodologi penelitian kualitatif*.Remaja rosda karya. Bandung
- Sugiyono, 2005.*Memahami penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Dokumen

Anonim.2005.undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

_____.2000.undang undang nomor 25 tentang program pembangunan nasional.